

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai kesimpulan dan rekomendasi penulisan skripsi yang berjudul “Kebijakan Politik NU Mengenai Dasar Negara (1945-1984). Kesimpulan merujuk pada pembahasan bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah.

5.1 Simpulan

Permasalahan yang diangkat dan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana Kebijakan politik NU mengenai dasar negara dari tahun 1945-1984. Kesimpulan ini memaparkan beberapa pokok pikiran yang merupakan inti dari permasalahan yang telah dikaji oleh peneliti. Adapun kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

Pertama, pandangan NU tentang hubungan agama dan negara mengalami perubahan dari masa ke masa. Sebelum kemerdekaan NU melalui surat kabar Berita Nahdlatul Ulama menanggapi artikel ‘Apa Sebab Turki Memisah Agama’ yang ditulis oleh Soekarno. Soekarno dalam tulisannya menyatakan bahwa tidak ada teks dalam Al-Qur’an maupun hadist yang memerintahkan mendirikan agama Islam. Bahkan tidak ada *ijma* ulama perihal negara Islam. Didalam negara Islam tidak ada garis demarkasi hubungan agama dan negara. Akibatnya persoalan yang murni agama akan dianggap persoalan negara. Menanggapi artikel ini Berita Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa Nabi Muhammad memang tidak diutus untuk mendirikan negara Islam. Tetapi, Islam yang didakwahkan Nabi Muhammad berdimensi agama dan dunia. Pendirian negara Islam didasarkan atas totalitas Islam dalam segala aspek kehidupan manusia. Berita Nahdlatul Ulama juga menjelaskan bahwa dalam negara Islam sumber hukumnya berasal dari Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma. Dalam Al-Qur’an dan Sunnah hanya menentukan yang dasar-dasar saja dan hal penting saja yang ditentukan. Sementara *ijtihad* ditempatkan untuk mengimplementasikan dasar negara Islam yang ditetapkan dalam Al-Qur’an. Pada masa ini terlihat NU mencita-citakan pendirian negara Islam. Di masa setelah kemerdekaan disidang konstituante NU bersama organisasi Islam lainnya memperjuangkan Islam sebagai

dasar negara. Namun usaha ini gagal karena ada penolakan dari kelompok Pancasila. Pada akhirnya Soekarno membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Setelah pemerintahan berganti dari Soekarno ke Soeharto cita-cita kelompok Islam kembali muncul. Berbeda dari waktu sebelumnya yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, pada masa ini kelompok Islam hanya menuntut untuk mengembalikan lagi Piagam Jakarta. Pemerintah menerima tuntutan ini, namun pengakuan Piagam Jakarta tidak menimbulkan konsekuensi apa pun. Untuk melemahkan posisi politik Islam Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan semua organisasi menggantikan asasnya dengan Pancasila. Pada mulanya kelompok Islam menolak kebijakan ini, namun pada akhirnya semua organisasi Islam menerima kebijakan ini. NU menjadi organisasi pertama yang mengganti asas organisasinya menjadi Islam. Hal ini menjadi menarik karena disidang konstituante NU bersama kelompok Islam lainnya menolak Pancasila dengan sangat keras. Jadi pada masa pemerintah Soeharto terjadi perubahan pandangan mengenai dasar negara pada kelompok Islam.

Kedua, pada masa orde lama NU bersama organisasi Islam lainnya memperjuangkan Islam sebagai dasar negara di sidang BPUPKI dan Konstituante. Disidang BPUPKI tokoh-tokoh NU bersama tokoh Islam lainnya memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Perjuangan menjadikan Islam sebagai dasar negara menemui jalan buntu karena ditolak oleh orang-orang yang berpaham nasionalis. Soekarno yang melihat adanya kebuntuan mengenai dasar negara berinisiatif membentuk panitia kecil untuk mempercepat penentuan mengenai dasar negara. Dari panitia ini terbentuklah sebuah dokumen yang terkenal dengan nama "Piagam Jakarta". Piagam Jakarta ini menjadi kompromi antara kelompok Islam dan Nasionalis. Namun kompromi ini gagal disahkan disidang PPKI. Kelompok Islam merasa kecewa dengan keputusan ini, tapi mereka optimis perjuangan menjadikan Islam sebagai Dasar Negara masih dapat diwujudkan. Hal ini karena undang-undang yang disahkan disidang PPKI hanya bersifat sementara dan akan dibentuk suatu badan untuk merumuskan Undang-Undang yang bersifat permanen. Pada tahun 1955 diadakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Anggota konstituante

yang terpilih akan bertugas untuk membentuk undang-undang dasar yang bersifat permanen. Seperti disidang BPUPKI persidangan di Konstituante berjalan dengan penuh perdebatan antara kelompok Islam dan kelompok Pancasila. NU bersama organisasi Islam lainnya termasuk Masyumi bersama-sama memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Meskipun NU sedang mengalami hubungan yang tidak baik dengan Masyumi, tapi berbicara mengenai dasar negara mereka dapat berkerjasama. Perdebatan antara kelompok Islam yang menghendaki Islam sebagai dasar negara dan kelompok Pancasila yang menghendaki Pancasila sebagai dasar negara tidak menghasilkan kesepakatan. Melihat kondisi konstituante yang seperti ini Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden yang berisi perintah pembubaran konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan berlakunya dekrit Presiden cita-cita kelompok Islam sebagai dasar negara kembali gagal.

Ketiga, ketika pemerintahan berganti dari Soekarno ke Soeharto mulai muncul harapan yang telah lama gagal. Harapan ini muncul karena kelompok Islam bersama Angkatan Darat ditahun 1965 membantu Soeharto untuk menjadi pemimpin Indonesia. Namun berbeda dari massa sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ini kelompok Islam menuntut pengakuan Piagam Jakarta. Tuntutan kelompok Islam diterima meskipun pengakuan Piagam Jakarta tidak menimbulkan konsekuensi apa pun. Meskipun pengakuan Piagam Jakarta tidak menimbulkan konsekuensi apa pun. Presiden Soeharto mulai curiga bahwa kelompok Islam akan mengubah Pancasila. Akibat kecurigaan ini Presiden Soeharto melakukan berbagai usaha untuk melindungi Pancasila. Beberapa cara yang dilakukan adalah mengadakan program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal semua organisasi yang ada di Indonesia. Mengenai kebijakan asas tunggal Pancasila menimbulkan dinamika yang cukup besar di tubuh NU. Untuk menyelesaikan masalah mengenai asas Pancasila NU, sampai harus memahasnya di musyawarah nasional alim ulama. Pada mulanya anggota NU yang membahas mengenai asas organisasi menolak Pancasila sebagai asas. Tetapi dengan penjelasan yang cemerlang dari Achmad Siddiq semua peserta pada akhirnya menerima Pancasila sebagai asas NU. Penerimaan NU terhadap Pancasila

disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, adanya tekanan politik dari Presiden Soeharto dan munculnya intelektual baru dalam diri NU. Pengetahuan generasi baru ini berbeda dengan intelektual generasi sebelumnya. Sebagian besar generasi ini terdidik di lembaga tradisional dan sebagian meneruskan studi di universitas barat. Pengetahuan mereka mengenai ilmu-ilmu sekular sama baiknya dengan pengetahuan tentang agama. Generasi ini berusaha mengembangkan sebuah format baru politik Islam dimana substansi, bukan bentuk menjadi orientasi utama. Itulah sebabnya mereka dapat menerima Pancasila berbeda dengan generasi sebelumnya yang menolaknya dengan keras.

5.2 Rekomendasi

Penelitian ini berfokus kepada kebijakan politik Nahdlatul Ulama mengenai dasar negara, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi berkaitan dengan dasar negara dan Nahdlatul Ulama. Rekomendasi yang sekiranya dapat penulis berikan adalah:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dijadikan rujukan materi pelajaran sejarah kelas XII kompetensi dasar 3.4 tentang menganalisis perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Khususnya mengenai perdebatan disidang konstituante. Selain itu kompetensi dasar 3.6. Menganalisis kehidupan politik pada masa orde baru, penelitian penulis dapat dijadikan rujukan.
2. Untuk peneliti selanjutnya penelitian yang penulis kaji dapat dilanjutkan dengan mengkaji tentang sikap NU mengenai Pancasila setelah reformasi yang dimana banyak orang-orang muslim untuk menyerukan pemberlakuan sistem khilafah di Indonesia untuk mengatasi masalah bangsa.